

**NASIONALISME DI TAPAL BATAS BIRU TANTANGAN DAN PERAN
MASYARAKAT PESISIR SEBAGAI PENJAGA KEDAULATAN**

Ayu Nisa¹, Novita Sari Hamka², Asmawati³, Deswita⁴, Desi Lestari⁵, Nursuhaela⁶,
Keyza Devina Maharani⁷

Universitas Sembilanbelas November Kolaka

¹ayu418686@gmail.com, ²novitasarihamka@gmail.com,

³asmawati0720033@gmail.com, ⁵desilestari7078@gmail.com,

⁶swetboyy5@gmail.com, ⁷Keyzadevina1306@gmail.com

ABSTRACT

As the world's largest archipelagic nation, Indonesia has vast maritime territory and shares direct borders with various countries. This makes coastal areas and maritime borders strategic for maintaining national sovereignty. Coastal communities not only play a role in the maritime economy but also serve as the vanguard in monitoring and protecting Indonesian territorial waters. However, various challenges such as poor development, limited access to public services, illegal fishing activities, cross-border smuggling, and the socio-cultural influences of neighboring countries can influence the level of nationalism in coastal communities. This research uses a literature review method by analyzing various relevant scientific articles, books, and policy documents. The results indicate that coastal communities make a significant contribution to maintaining national sustainability through social oversight, reporting illegal activities, preserving maritime culture, and managing sustainable marine resources. Therefore, synergy between the government, security forces, and communities is needed to strengthen coastal development to improve community welfare while strengthening maritime nationalism.

Keywords: maritime nationalism, coastal communities, state sovereignty, border areas, blue borders.

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki wilayah laut yang luas dan berbatasan langsung dengan berbagai negara. Kondisi tersebut menjadikan kawasan pesisir dan perbatasan laut sebagai wilayah strategis dalam menjaga kedaulatan negara. Masyarakat pesisir tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi maritim, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam pengawasan dan perlindungan wilayah perairan Indonesia. Namun demikian, berbagai tantangan seperti kesenjangan pembangunan, rendahnya akses pelayanan publik, aktivitas penangkapan ikan ilegal, penyelundupan lintas batas, serta pengaruh sosial budaya negara tetangga dapat memengaruhi tingkat nasionalisme masyarakat pesisir. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis berbagai artikel ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan

bahwa masyarakat pesisir memiliki kontribusi penting dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan sosial, pelaporan aktivitas ilegal, pelestarian budaya maritim, serta pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam memperkuat pembangunan wilayah pesisir guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat nasionalisme maritim.

Kata Kunci: nasionalisme maritim, masyarakat pesisir, kedaulatan negara, wilayah perbatasan, tapal batas biru

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 108.000 km yang menjadikannya salah satu negara dengan wilayah pesisir terluas di dunia. (Hakiem, 2023). Wilayah perbatasan laut Indonesia berbatasan dengan sedikitnya sepuluh negara, sehingga memiliki posisi strategis sekaligus rentan terhadap berbagai ancaman keamanan maritim. Berbagai kasus illegal fishing, penyelundupan barang, perdagangan manusia, dan pelanggaran batas wilayah masih menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara. Dalam konteks tersebut, keberadaan masyarakat pesisir menjadi sangat penting karena mereka merupakan kelompok yang berinteraksi langsung dengan ruang laut dan menjadi aktor pertama yang dapat mendeteksi

berbagai aktivitas yang berpotensi mengancam kedaulatan negara.

Indonesia dikenal sebagai negara maritim yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang mencapai sekitar dua pertiga dari total luas wilayah negara. Posisi geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra menjadikan wilayah perairannya sangat strategis dalam aspek ekonomi, politik, maupun keamanan. Kondisi ini menempatkan masyarakat pesisir sebagai kelompok yang memiliki kedekatan langsung dengan wilayah perbatasan negara sehingga berperan penting dalam menjaga kedaulatan nasional.

Dalam konteks negara kepulauan, nasionalisme tidak hanya diwujudkan melalui kecintaan terhadap tanah air, tetapi juga melalui kesadaran masyarakat dalam menjaga ruang laut sebagai bagian

integral dari wilayah negara. Masyarakat pesisir merupakan kelompok yang sehari-hari berinteraksi dengan laut sehingga memiliki pengetahuan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengawasan wilayah perairan Indonesia. Kehadiran mereka sering kali menjadi sumber informasi awal terkait aktivitas pelanggaran batas wilayah, illegal fishing, penyelundupan, maupun berbagai ancaman non-tradisional lainnya (Junita et al., 2026).

Namun demikian, nasionalisme masyarakat pesisir tidak dapat dilepaskan dari berbagai persoalan yang mereka hadapi. Keterbatasan pembangunan, rendahnya akses pendidikan dan kesehatan, serta ketimpangan ekonomi dibandingkan wilayah perkotaan dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap negara. Kajian Pamungkas menunjukkan bahwa nasionalisme masyarakat perbatasan sering kali berkaitan erat dengan kondisi sosial-ekonomi yang mereka alami. Ketika negara mampu hadir melalui pembangunan dan pelayanan publik, rasa kebangsaan masyarakat cenderung meningkat. Sebaliknya, ketertinggalan pembangunan dapat

menjadi tantangan bagi penguatan nasionalisme masyarakat perbatasan (Khaerul, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan nasionalisme di wilayah pesisir perbatasan serta menganalisis peran masyarakat pesisir sebagai penjaga kedaulatan negara.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber ilmiah berupa jurnal nasional dan internasional, buku akademik, laporan lembaga pemerintah, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan nasionalisme maritim, masyarakat pesisir, dan kedaulatan wilayah perbatasan. Literatur yang digunakan merupakan publikasi dalam rentang tahun 2015–2025 untuk memperoleh data yang relevan dan mutakhir. Analisis data dilakukan melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis berbagai temuan penelitian terdahulu sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tantangan nasionalisme dan peran masyarakat

pesisir dalam menjaga kedaulatan negara.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Nasionalisme dalam Perspektif Masyarakat Pesisir

Nasionalisme merupakan kesadaran kolektif yang mendorong individu untuk memiliki rasa cinta, loyalitas, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Pada masyarakat pesisir, nasionalisme memiliki karakteristik yang khas karena dibentuk oleh interaksi langsung dengan wilayah laut dan perbatasan negara. Kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut menjadikan mereka memiliki hubungan yang erat dengan ruang maritim sebagai bagian dari identitas kebangsaan (Pamungkas, 2015).

Penelitian mengenai masyarakat perbatasan laut di Karimun menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kebanggaan terhadap identitas kebangsaan Indonesia, meskipun dalam kehidupan sehari-hari mereka sering berinteraksi dengan negara tetangga. Identitas nasional tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial mereka, terutama ketika negara hadir melalui

pembangunan dan pelayanan publik yang memadai.

Nasionalisme masyarakat pesisir juga tercermin melalui berbagai praktik budaya maritim, seperti tradisi pelayaran, kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya laut, dan partisipasi dalam menjaga keamanan wilayah perairan. Budaya maritim tersebut menjadi modal sosial yang dapat memperkuat rasa memiliki terhadap wilayah laut Indonesia (Pamungkas, 2015).

2. Tantangan Nasionalisme di Tapal Batas Biru

Wilayah pesisir dan perbatasan laut menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi tingkat nasionalisme masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan pembangunan antara wilayah pusat dan daerah perbatasan. Keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi sering kali menimbulkan perasaan terpinggirkan di kalangan masyarakat perbatasan. Kondisi tersebut dapat melemahkan keterikatan emosional masyarakat terhadap negara apabila tidak ditangani secara serius.

Selain itu, globalisasi dan interaksi lintas batas juga menjadi

tantangan tersendiri. Masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan sering kali memiliki hubungan ekonomi dan budaya yang erat dengan negara tetangga. Dalam beberapa kasus, hubungan tersebut dapat membentuk identitas ganda yang memengaruhi cara masyarakat memaknai nasionalisme. Penelitian Dedees mengenai masyarakat perbatasan Batam menunjukkan bahwa kedekatan budaya Melayu lintas negara menciptakan dinamika identitas yang kompleks dalam konstruksi nasionalisme masyarakat perbatasan.

Tantangan lainnya adalah meningkatnya ancaman keamanan maritim seperti penangkapan ikan ilegal, perdagangan manusia, penyelundupan barang, serta pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing. Aktivitas tersebut tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga dapat mengancam kedaulatan wilayah Indonesia apabila tidak diawasi secara efektif (Sugianto et al., 2011).

3. Peran Masyarakat Pesisir sebagai Penjaga Kedaulatan

Masyarakat pesisir memiliki posisi strategis sebagai penjaga pertama wilayah laut Indonesia.

Kehadiran mereka di kawasan perairan memungkinkan terjadinya pengawasan sosial terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Nelayan misalnya, sering kali menjadi pihak pertama yang mengetahui keberadaan kapal asing atau aktivitas mencurigakan di wilayah perairan Indonesia. Informasi tersebut dapat menjadi dasar bagi aparat keamanan untuk melakukan tindakan pengawasan dan penegakan hukum.

Selain fungsi pengawasan, masyarakat pesisir juga berperan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan tidak hanya mendukung kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat kedaulatan negara atas wilayah lautnya. Ketika masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga ekosistem laut, maka mereka turut berkontribusi dalam mempertahankan kekayaan nasional.

Peran penting lainnya adalah sebagai agen pendidikan nasionalisme maritim. Masyarakat pesisir dapat menjadi aktor utama dalam mewariskan nilai-nilai kebangsaan melalui tradisi lokal, pendidikan keluarga, dan aktivitas

sosial kemasyarakatan. Penguatan nasionalisme berbasis kearifan lokal dinilai efektif dalam menanamkan rasa cinta tanah air pada masyarakat perbatasan.

Selain berfungsi sebagai pengawas sosial, masyarakat pesisir juga berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung konsep keamanan maritim berbasis masyarakat (community-based maritime security). Konsep ini menempatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem deteksi dini terhadap berbagai ancaman yang muncul di wilayah perairan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan wilayah laut terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengamanan kawasan perbatasan karena masyarakat memiliki pengetahuan lokal mengenai kondisi geografis, aktivitas pelayaran, dan dinamika sosial yang berlangsung di wilayahnya.

Di beberapa daerah perbatasan Indonesia, keterlibatan kelompok nelayan dalam memberikan informasi kepada aparat keamanan mengenai keberadaan kapal asing ilegal telah membantu upaya penegakan hukum di laut. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas

masyarakat pesisir dapat menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung sistem pertahanan negara secara nonmiliter (Harmain et al., 2026).

4. Strategi Penguatan Nasionalisme Maritim

Penguatan nasionalisme di wilayah pesisir memerlukan pendekatan yang komprehensif. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah pesisir dan perbatasan. Kehadiran negara melalui pembangunan akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kedua, pendidikan kebangsaan berbasis budaya maritim perlu diperkuat. Pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dan identitas maritim dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kedaulatan negara.

Ketiga, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir harus menjadi prioritas. Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan berdampak positif terhadap penguatan nasionalisme dan

partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah laut.

Keempat, penguatan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, TNI AL, Bakamla, dan instansi terkait sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengawasan wilayah laut yang lebih efektif dan partisipatif.

Nasionalisme masyarakat pesisir merupakan bentuk kecintaan dan tanggung jawab terhadap bangsa yang tumbuh dari kedekatan mereka dengan wilayah laut sebagai bagian dari identitas kebangsaan. Meskipun masyarakat pesisir, khususnya di wilayah perbatasan, sering berinteraksi dengan negara tetangga, identitas nasional Indonesia tetap dapat terjaga melalui kehadiran negara, budaya maritim, serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Namun, nasionalisme di tapal batas biru menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan pembangunan, pengaruh globalisasi dan interaksi lintas batas yang dapat memunculkan identitas ganda, serta ancaman keamanan maritim berupa penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, perdagangan manusia, dan pelanggaran batas

wilayah oleh kapal asing. Tantangan tersebut berpotensi melemahkan rasa kebangsaan apabila tidak direspons dengan kebijakan yang tepat.

Dalam konteks ini, masyarakat pesisir memiliki peran strategis sebagai penjaga kedaulatan negara. Mereka berfungsi sebagai pengawas sosial di wilayah laut, pelindung keberlanjutan sumber daya maritim, agen pendidikan nasionalisme berbasis kearifan lokal, serta mitra pemerintah dalam sistem keamanan maritim berbasis masyarakat. Pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat pesisir menjadikan mereka bagian penting dalam deteksi dini terhadap berbagai ancaman di perairan Indonesia.

Oleh karena itu, penguatan nasionalisme maritim perlu dilakukan melalui peningkatan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah pesisir, penguatan pendidikan kebangsaan yang berlandaskan budaya maritim, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, serta peningkatan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, TNI AL, Bakamla, dan berbagai pihak terkait. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat rasa cinta tanah air

sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur, nasionalisme masyarakat pesisir memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kesejahteraan, akses pembangunan, serta kehadiran negara di wilayah perbatasan. Masyarakat pesisir tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi maritim, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan wilayah laut, pelestarian budaya maritim, dan pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Tantangan berupa kesenjangan pembangunan, pengaruh lintas batas, serta ancaman keamanan maritim masih menjadi faktor yang dapat memengaruhi penguatan nasionalisme masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penguatan pembangunan wilayah pesisir, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan kebangsaan berbasis maritim, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi langkah penting dalam memperkuat nasionalisme di tapal batas biru Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, L. (2023). *Analisis Perubahan Garis Pantai di Kabupaten Tuban Tahun 2000, 2015, dan 2020*. 2(2), 2–8.
- Junita, M., Ramadani, A., & Hendrayeni, N. P. (2026). *Penegakan Hukum dan Hambatan Kepolisian Perairan terhadap Praktik Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Laut Natuna Utara)*. 2(5), 2162–2171.
- Khaerul, M. (2025). *KETIMPANGAN KESEHATAN SEBAGAI PRAKTIK SOSIAL: KAJIAN SOSIOLOGI KRITIS PIERRE BOURDIEU TERHADAP MASYARAKAT PESISIR DI ERA POSTMODERN HEALTH INEQUALITY AS A SOCIAL PRACTICE: A CRITICAL SOCIOLOGICAL STUDY OF PIERRE BOURDIEU ON COASTAL COMMUNITIES IN THE POSTMODERN ERA* Ketimpangan kesehatan merupakan salah satu isu krusial dalam kajian pembangunan sosial dan kebijakan publik , struktur indikator capaian di

negara berkembang dengan pembangunan kesehatan belum kelompok masyarakat . Ketimpangan tersebut kesehatan antarwilayah dan kelas sosial , tetapi sistem kesehatan . Dalam konteks perkotaan ketimpangan kesehatan akibat akumulasi Pada era postmodern , sistem kesehatan ditandai oleh menguatnya logika pasar , hak sosial yang dijamin negara , tetapi juga komoditas yang diperjualbelikan melalui mekanisme pasar . yang hierarkis , di mana akses terhadap kepemilikan modal ekonomi , budaya , dan Berbagai penelitian sebelumnya mengenai ketimpangan kesehatan umumnya berangkat dari perspektif determinan sosial pemahaman tentang hubungan antara struktur sosial dan ketimpangan kesehatan . Namun , praktik keseharian , relasi simbolik , serta masalah kesehatan sebagai akibat dari pilihan menyalahkan korban (*victim blaming*), karena pilihan dan praktik kesehatan masyarakat Kritik terhadap

pendekatan individualistik ini telah disampaikan dalam kajian sosiologi kesehatan kritis yang menegaskan bahwa praktik kesehatan tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan , praktik sosial . Konsep habitus , modal serta kekerasan simbolik memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana ketimpangan kesehatan diproduksi , dinormalisasi , dan direproduksi Indonesia masih relatif terbatas . Kebaruan artikel ini terletak pada upaya memposisikan ketimpangan kesehatan bukan sekadar sebagai persoalan akses atau perilaku , yang terbentuk melalui relasi antara habitus kesehatan warga pesisir , distribusi modal , dan kajian ini adalah menganalisis ketimpangan kesehatan pada masyarakat pesisir Kecamatan. 6(1), 91–96.

Pamungkas, C. (2015). Nasionalisme Masyarakat Di Perbatasan Laut: Studi Kasus Masyarakat Melayu-Karimun. *Lipi*, 41(2), 147–162. <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jmiipks/article/view/253/119>

Sugianto, A., Agussalim, D., &

- Armawi, A. (2011). Penanganan keamanan maritim perbatasan wilayah laut dan dampaknya pada aspek pertahanan keamanan. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9(2), 113–128. <https://jurnal.lemhannas.go.id>
- Hakim, L. (2023). *Analisis Perubahan Garis Pantai di Kabupaten Tuban Tahun 2000, 2015, dan 2020*. 2(2), 2–8.
- Junita, M., Ramadani, A., & Hendrayeni, N. P. (2026). *Penegakan Hukum dan Hambatan Kepolisian Perairan terhadap Praktik Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Laut Natuna Utara)*. 2(5), 2162–2171.
- Khaerul, M. (2025). *KETIMPANGAN KESEHATAN SEBAGAI PRAKTIK SOSIAL: KAJIAN SOSIOLOGI KRITIS PIERRE BOURDIEU TERHADAP MASYARAKAT PESISIR DI ERA POSTMODERN HEALTH INEQUALITY AS A SOCIAL PRACTICE: A CRITICAL SOCIOLOGICAL STUDY OF PIERRE BOURDIEU ON COASTAL COMMUNITIES IN THE POSTMODERN ERA* Ketimpangan kesehatan merupakan salah satu isu krusial dalam kajian pembangunan sosial dan kebijakan publik , struktur indikator capaian di negara berkembang dengan pembangunan kesehatan belum kelompok masyarakat . Ketimpangan tersebut kesehatan antarwilayah dan kelas sosial , tetapi sistem kesehatan . Dalam konteks perkotaan ketimpangan kesehatan akibat akumulasi Pada era postmodern , sistem kesehatan ditandai oleh menguatnya logika pasar , hak sosial yang dijamin negara , tetapi juga komoditas yang diperjualbelikan melalui mekanisme pasar . yang hierarkis , di mana akses terhadap kepemilikan modal ekonomi , budaya , dan Berbagai penelitian sebelumnya mengenai ketimpangan kesehatan umumnya berangkat dari perspektif determinan sosial pemahaman tentang hubungan antara struktur sosial dan ketimpangan kesehatan . Namun , praktik keseharian ,

relasi simbolik , serta masalah kesehatan sebagai akibat dari pilihan menyalahkan korban (*victim blaming*), karena pilihan dan praktik kesehatan masyarakat Kritik terhadap pendekatan individualistik ini telah disampaikan dalam kajian sosiologi kesehatan kritis yang menegaskan bahwa praktik kesehatan tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan , praktik sosial . Konsep habitus , modal serta kekerasan simbolik memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana ketimpangan kesehatan diproduksi , dinormalisasi , dan direproduksi Indonesia masih relatif terbatas . Kebaruan artikel ini terletak pada upaya memposisikan ketimpangan kesehatan bukan sekadar sebagai persoalan akses atau perilaku , yang terbentuk melalui relasi antara habitus kesehatan warga pesisir , distribusi modal , dan kajian ini adalah menganalisis ketimpangan kesehatan pada masyarakat pesisir Kecamatan. 6(1), 91–96.

Masyarakat Di Perbatasan Laut: Studi Kasus Masyarakat Melayu-Karimun. *Lipi*, 41(2), 147–162. <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jmiipks/article/view/253/119>

Sugianto, A., Agussalim, D., & Armawi, A. (2011). Penanganan keamanan maritim perbatasan wilayah laut dan dampaknya pada aspek pertahanan keamanan. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9(2), 113–128. <https://jurnal.lemhannas.go.id>

Pamungkas, C. (2015). Nasionalisme